



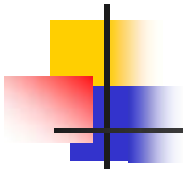
Penelusuran...

Upload presentasi

Penelusuran

Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini . Untuk men-download , silahkan rekomendasi presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial . Tombol yang harus diklik terletak di bawah posting ini . Terima kasih .

Tombol:



Pustaka

2

- Depkominfo, Strategi Dan Kebijakan Telematika Di Indonesia, 2001.
- Depkominfo, Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia, 2006.
- Depkominfo, Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pendidikan , 2007.
- Lukito Edi Nugroho, E-Government di Indonesia.

Batalkan

Download

E-Government Komputer dan Masyarakat Nur Cahyo Wibowo, SKom, MKom

Diterbitkan oleh Ramdan Kancil

Telah diubah "4 tahun yang lalu

2

</>

Sematkan



Upload presentasi

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "E-Government Komputer dan Masyarakat Nur Cahyo Wibowo, SKom, MKom"— Transcript presentasi:

Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini. Untuk men-download, silahkan rekomendasikan presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jejaring sosial. Tombol yang harus diklik terletak di bawah posting ini. Terima kasih.

Tombol:

2 Daftar Isi Beberapa fakta tentang E-Gov.

Rencana Strategis E-Gov di Indonesia.

Arsitektur E-Gov di Indonesia.

Permasalahan terkait E-Gov.

2

3 E-Gov di Beberapa Negara

Country

ESD Target

Measurement

Australia

All appropriate Federal Government services capable of being delivered electronically via the Internet by 2001

ANAO report on progress (Nov 1999). OGO six monthly monitoring program commencing June 2000.

Canada

All key government services fully on-line by 2004

Finland

A significant proportion of forms & requests can be dealt with electronically by 2001

France

All administrations to provide public access to government services and documents by the end of 2000

Germany

No high level targets *

Ireland

All but most complex of integrated services by end of 2001

Reported on annually

Italy

No high level targets

Japan

All applications, registrations, and other administrative procedures between the people and the government will be available on-line using the Internet or other means by fiscal year 2003

The Netherlands

25% of public services delivered electronically by 2002

ICT benchmark in development

Singapore

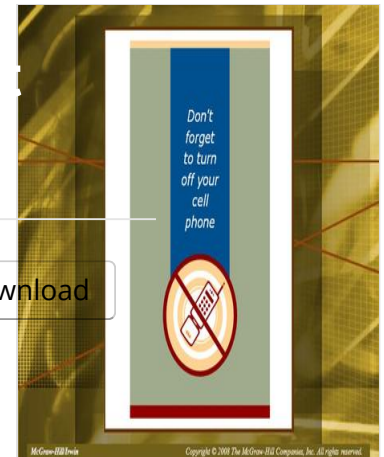
Where feasible all counter services available electronically by 2001

Sweden

UK

Beberapa Mitos dan Kenyataan dalam Pengembangan E-Government di Indonesia

Lukito Edi Nugroho
Program S2 Magister Teknologi Informasi
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada



INTENSITAS DAN KUALITAS
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL
DAN EKSTERNAL



Aplikasi
Teknologi
Informasi

Quantitative 6 monthly progress report

USA

Provide public access to government services and documents by

Provide public with an option to submit forms electronically

Upload presentasi



4 e-Government in The World

Recent UN study

website

Seamless

(0%)

Transactional

(10%)

Emerging

(19%)

Interactive

(33%)

Enhanced

(38%)

Stages of e-Government Development

Emerging : web presence with limited and static information

Enhanced : web presence with dynamic contents

Interactive : capabilities to download information and interact with gov electronically

Transactional : capabilities to activate financial transactions such as making payments

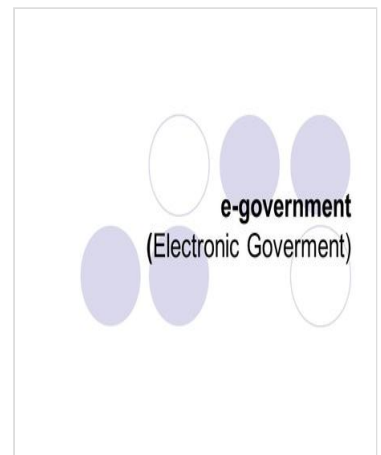
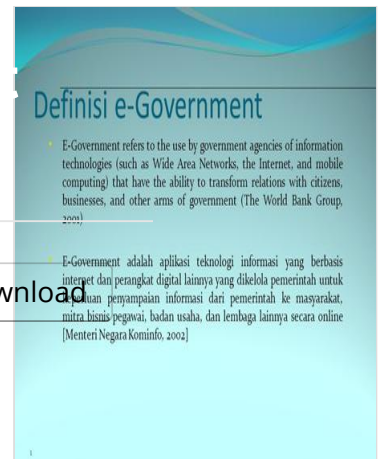
Seamless : full integration of e-Government processes across government agencies

Tombol:

2

Batalan

Download



5 Rangking TIK Indonesia

Ketegori

Sumber

Rangking

Jumlah Negara

Indikator

E-Readiness

Economist Intelligence Unit

60 65

Network Access

Networked Learning

Networked Society

Networked Economy

Network Policy

Digital Opportunity Index

ITU

38 40

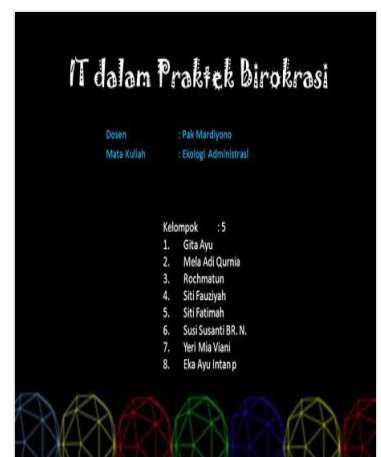
Opportunity

Infrastructure

Utilization

E-Government

University of Waseda



Network Preparedness
 Required Interface Functioning Application
 Management Optimization
 Homepage
 CIO

Promotion of e-Government

Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini . Untuk men-download , silahkan rekomendasi presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial . Tombol yang haris diklik terletak di bawah posting ini . Terima kasih .

6

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

(Detiknas)

KETUA

Tombol:

Presiden R.I.

WAKIL KETUA

Menko Perekonomian

KETUA PELAKSANA HARJATI

Menteri Kominfo

ANGGOTA

Menteri Keuangan

Menteri Riset & Teknologi

Menteri PPN/Kepala BAPPENAS

Menteri Pendidikan Nasional

Menteri Perdagangan

Menteri Perindustrian

Menteri Dalam Negeri

Pakar/Individu

TIM PENASEHAT

Pakar/individu yg berpengalaman dlm Best Practice bid ICT tkt Internasional dan Nasional

- Memberikan masukan strategis

TIM MITRA

MASTEL ; FTII & ASOSIASI-2 Bidang Telematika; Perguruan Tinggi; Kadin

- Memberikan masukan kebijakan

SEKRETARIAT

Administrasi , Keuangan,

Program/Agenda, Koordinasi

OUTCOME

Direktif Strategik dan Kebijakan utk Pendayagunaan Teknologi Telematika

- Fasilitasi dan Insentif utk

Pengembangan Industri Telematika

TIM

KERJA

e-Government

(NIN, e-Proc, e-Pajak, e-Payment)

e-Learning

(Indonesia Education Exchange)

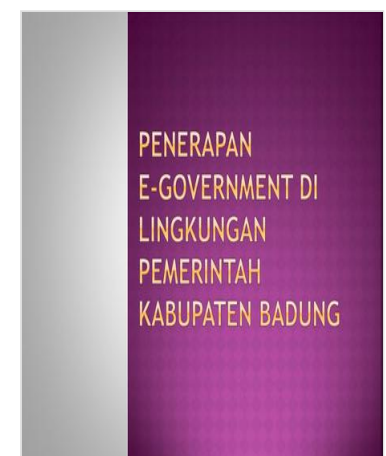
e-Infrastructure

(PKInfras, e-Industry, USO Comm)

2

Batalan

Download



7 JARING SIMPUL INFORMASI NASIONAL

8 VISI : Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015)

50 % Penduduk Terhubung Ke ICT

100 % Penduduk akses TV dan RADIO

DESA

UNIVERSITAS, AKADEMI

SMU, SMP, SD

PUSAT ILMU DAN PENELITIAN

PERPUSTAKAAN UTM

PUSAT KEBUDAYAAN

MUSEUM, ARSIP, POS

RUMAH SAKIT,

PEMERINTAH PUSAT v. bsita dan alamat

PEMDA website dan alamat ;

TERHUBUNG

ICT

2

Batalan

Download

9 Public Private Partnership

Strategi 315 □ MII2015

5

e-Leadership

e-Pendidikan

e-Infrastruktur

e-Industri

e-Government

Flagship Programs

1

Public Private Partnership

Alokasi

Sumber

Daya

3

Pilar

Infrastruktur

Informasi

Sumber

Daya Manusia &

Kelembagaan TIK

Regulasi

10 Strategi Pengembangan Aplikasi

e-Police

e-Govt

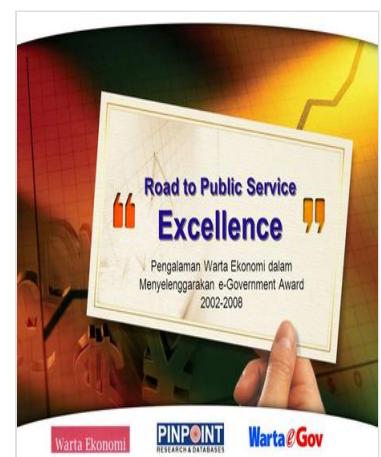
e-Proc

e-Services

e-ID

Blended Learning

e-Learning



Upload presentasi

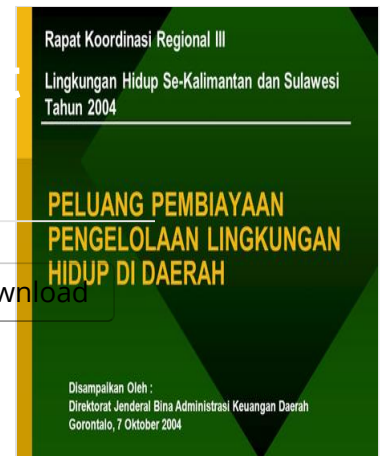
Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini . Untuk men-download , silahkan rekomendasi presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial . Tombol yang harus diklik terletak di bawah posting ini . Terima kasih .

Tombol:

2

Batalan

Download



11 ?

Mengapa e-Government

Inpres No 3/2003

Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya

Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan

Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global

Peningkatan daya saing

12 DASAR PEMIKIRAN E-GOV G 4 C INFRASTRUKTUR e-GOV G 4

G G 4 B

Aplikasi e-Gov

INFRASTRUKTUR e-GOV

G 4 G

IGASIS

Pedoman – sosialisasi

Aplikasi e-GOV

Intranet antar kantor pemerintah

Data recovery untuk pemerintah

Fasilitas keamanan server, jaringan, dan data

G 4 B

e-PROC

Aplikasi e-Gov

Ref UU 22/99, UU 32/04, dan UU 3/05 ttg PemDa:

50 modul aplikasi e-Gov di PemPusat

47 modul aplikasi e-Gov di PemDa

13 Pengembangan e-Government

Tujuan Strategis Upload presentasi
Pengembangan e-Government
(Inpres 3 tahun 2003)

Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C). Untuk men-download, silakan rekomendasikan presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial. Tombol yang harus diklik terletak di bawah posting ini. Terima kasih.

Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B).

Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta

Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta mempromosikan transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G)

2

14 Kerangka Arsitektur e-Gov

Sumber : Inpres 3 tahun 2003

Batalan

Download

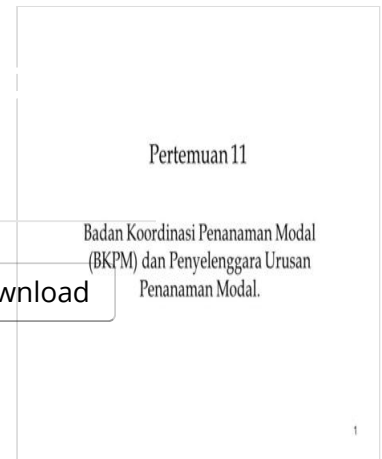
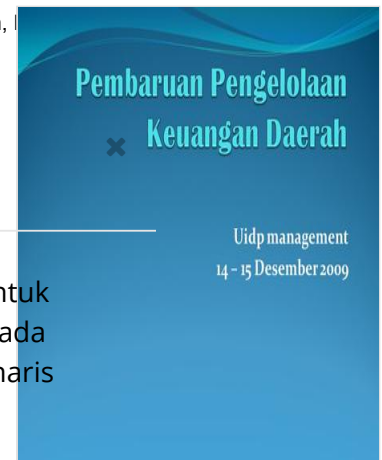
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) dan Penyelenggara Urusan
Penanaman Modal.

Pertemuan 11

15 Pengembangan Aplikasi e-Government

Aplikasi Layanan Publik Pada
Instansi Pemerintah Pusat
Informasi Kebijakan Publik
(UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Kepdirjen, dll)
Layanan Informasi Umum ttg Instansi
Informasi dari Masyarakat
Layanan Darurat/Bencana
Layanan Pencatatan/Pendaftaran
Layanan Perijinan
Layanan Pembayaran
Layanan Khusus lainnya
Pemerintah
Pusat
(Dep, Kementri, LPND)
Back Office :
Untuk Pusat dan Daerah
1. Administrasi
Keuangan
2. Kekayaan / Asset
3. Kepegawaian
4. Pengendalian Proyek
5. Pengadaan Barang Dan Jasa
6. Sistem Pelaporan

<https://slideplayer.info/slide/3064759/>



Internal

8. dll

Pengem-
bangan

Aplikasi

E-Gov

Aspek yg diperhatikan :

Tupoksi

Kompleksitas

Sumber Daya-Tahapan

Aplikasi Layanan Publik Pada

Instansi Pemerintah Daerah

Informasi Kebijakan Publik

Informasi dari Masyarakat

Informasi Daerah (pekerjaan, pariwisata,
pertanian, kependudkn, dll)

GIS/Mapping

Informasi Darurat/Bencana

Layanan Kependdikan (KTP, KK, Akte Lahir

Akte Nikah/Cerai/Kematian, dll)

Layanan Pendidikan

Layanan Kesehatan

Layanan Pendaftaran

Layanan Perijinan

Layanan Pembayaran

Pemerintah

Daerah

(Prov, Kab/

Kota)

Upload presentasi

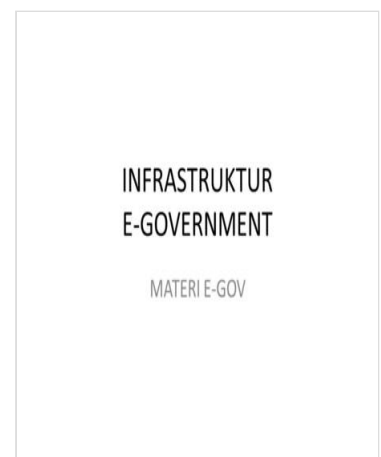
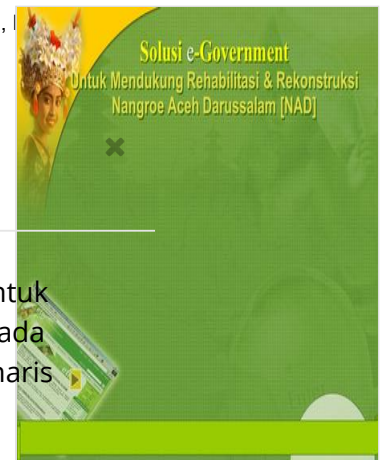
Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini . Untuk
men-download , silahkan rekomendasi presentasi ini kepada
teman-teman Anda dalam jaringan sosial . Tombol yang haris
diklik terletak di bawah posting ini . Terima kasih .

Tombol:

2

Batalkan

Download



16 Kerangka Fungsi Sistem Pemerintahan di Pemda

Blok-blok fungsi dasar umum

Pelayanan

Adm & Mgmt

Legislasi

Pembangunan

Keuangan

Kepegawaian

Kependudukan

Perpajakan dan Retribusi

SIM Data Pembangunan

Surat

Elektronik

Sistim

Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem

Administrasi

DPRD

Anggaran

Pengadaan

Pemlu Daerah

Absensi dan Penggajian

Penilaian Kinerja

Sistem Kas dan Perbendaharaan

Akuntansi Daerah Upload presentasi

Kolaborasi

dan Koordinasi

Pendidikan

dan Latihan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan

dan

Monitoring Proyek

Katalog

Hukum, Peraturan dan Perundangan

Sistem Evaluasi

dan Informasi Hasil Pembangunan

Pendaftaran

dan Perijinan

Manajemen Pelaporan Pemerintahan

Publikasi

Info Umum & Pemerintahan

Bisnis

Dan Investasi

Pengaduan Masyarakat

Pendukung Keputusan

Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini . Untuk men-download , silahkan rekomendasi presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial . Tombol yang harus diklik terletak di bawah posting ini . Terima kasih .

Tombol:

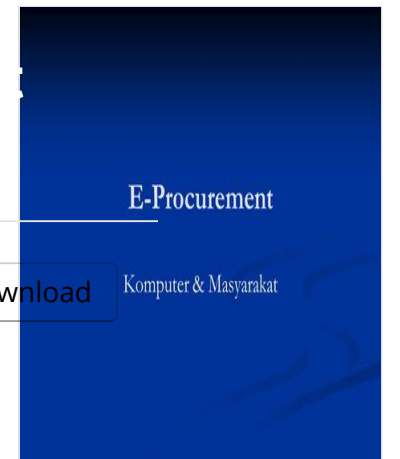
2

Batalan

Download

E-Procurement

Komputer & Masyarakat

**17** Contoh: e-Batam

Seamless coordination among Government Sectors in Batam toward
Batam Single Window
Business Model

18 Manfaat Bank Data Penduduk dgn Pelayanan Publik

Jasa layanan :

Air Bersih, Telepon, Listrik

Pelayanan Sosial :

Kesehatan,

Pendidikan,

Asuransi, JPS

Perijinan :

Usaha, Perdagangan

DATABASE

PENDUDUK

(NIK)

Intranet

Pelayanan

Kepemilikan :

Sertifikat

Tanah, IMB

Perpajakan/Kepolisian :

SPT, PBB, BPKB,

STMD

Keimigrasian

Pasport, KITAS, KITAP

Pelayanan

Perbankan

Upload presentasi



19 Single Identification

Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini . Untuk men-download , silahkan rekomendasi presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial . Tombol yang haris diklik terletak di bawah posting ini . Terima kasih .

Number/Nomor
Identitas Tunggal

No Sertif HAT (NIB) Tombol:

No KTP

No KK

No IMB

No Paspor

No SPPT (NOP)

No SIM

No Pelangg List

No NPWP

No Pelangg Tlp

NIP

NOMOR

BERSAMA

(Common ID)

No Pelangg Air

NRP

No Pelangg Gas

No BPKB

No Inv Aset Drh

No Rek/Kartu

No Inv Aset Neg

ID

Bdsk

Bid/

Badan

No Polis

ID

Bdsk

Perso-

nal

NIT/KIN

No SIUP

No Askes

No SI Temp Ush

No Astek

Akte Pend Perush

No Akta Kelah

No Ij Kuasa Tambang

No Akta Nikah

No PEB/PIB

DLL

No Sensus

KODE BIDANG

2

Batal

Download

9/1/2019
(Prop, Kab, Kec, Kelur, Blok, Urut lain)
(Tgl, Bln, Thn, Kelamin, Dst)

Upload presentasi



20 (Kartu Identitas Nasional - KIN)

Multi-Purposes Card
(Kartu Identitas Nasional - KIN)
Additional Flexible Storage
Embossing
Storage Chip Data
Secure ID
Photo & Signatures for Virtual Verification
Mag Stripe & Bar Codes for multi-use
Digital Certification
Version
Serial Number
Certificate Authenticator
Issued/Valid
Subject (User/Company)
Public Key
Digital Signature
Crypto Chip Data
Digital
Signatures
Individual's Secret Key
Algorithm & Processes
Functions + Personal Data
Certificates
on a Smart Card

Tombol:

2

Batal

Download

21 Services : Multi-Purposes NATIONAL ID CARDS (KIN)

Identifikasi
Transportasi:
Perbankan:
Utiliti
KTP
SIM
STNK
IMB
Sertifikat Tanah
Akte Kelahiran,
Kematian, perkawinan and perceraian
Layanan Kesehatan dan Asuransi
Pajak
Pepindahan penduduk
dll
Toll
Kereta Api
Bis
Taksi
dll

Electronic Money

Home/Firm Banking

dll

PLN

PAM

TELEPON

dll

Upload presentasi

**22****Problem Implementasi E-Gov**

Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini . Untuk men-download , silahkan rekomendasi presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial . Tombol yang harus diklik terletak di bawah posting ini . Terima kasih .

Pemerintah pusat

Belum ada rencana untuk atau strategi nasional yang komprehensif

Kesamaan pandangan dan gerak langkah antar departemen belum optimal

Pemerintah daerah

Otonomi daerah membuat tiap daerah memiliki prioritas yang berbeda tentang implementasi e-gov

Masyarakat

Fenomena digital divide masih terasa cukup besar

(Disamping kendala-kendala umum: pemahaman tentang e-gov, dana, infrastruktur, SDM, dsb)

Batalan

Download

23**E-Gov dan Reformasi Birokrasi**

E-government dan reformasi birokrasi □ business process reengineering dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemanfaatan TI secara optimal

Bertujuan untuk mencapai keselarasan □ dasar untuk mencapai transformasi

24**Pustaka**

Depkominfo, Strategi Dan Kebijakan Telematika Di Indonesia, 2001.

Depkominfo, Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia, 2006.

Depkominfo, Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pendidikan, 2007.

Lukito Edi Nugroho, E-Government di Indonesia.

[Download ppt "E-Government Komputer dan Masyarakat Nur Cahyo Wibowo, SKom, MKom"](#)

☰ Presentasi serupa

Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government

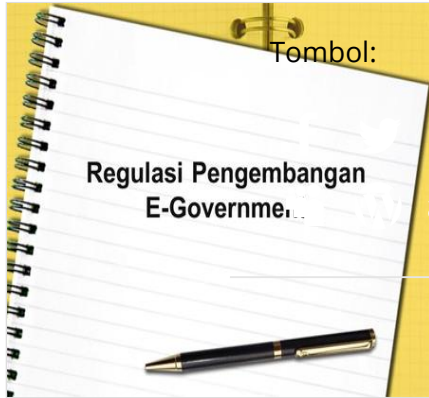
Perencanaan Strategis e-Government
Implementasi dan Penilaian e-Government
Anggaran e-Government

Upload presentasi

Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini. Untuk men-download, silahkan rekomendasi presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial. Tombol yang harus diklik terletak di bawah posting ini. Terima kasih.



SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH



Tombol:



Batalan

Marketing Management

E - Commerce
M-12

Download

Tony Sandjaja
Copyright 2008 Pearson Education Inc.

1

Elemen Sukses Pengembangan & Tantangan e-Gov



Pertemuan Ke-2

Tipe dan Jenis E-Business

KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN



POKOK BAHASAN

- SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK
- MODEL, STRATEGI DAN ROAD MAP E-GOVERNMENT
- JENIS-JENIS APLIKASI TIK
- IMPLEMENTASI TIK

E-Government E-Governance

Desy Intan Permatasari
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2016



PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. DELI SERDANG TAHUN 2015



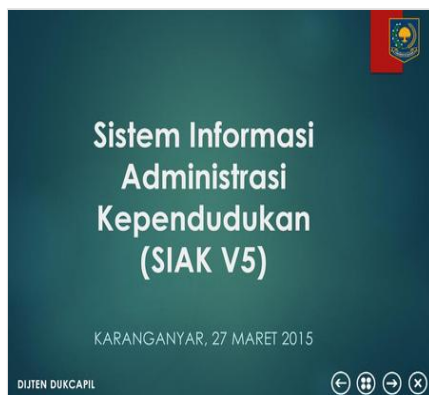
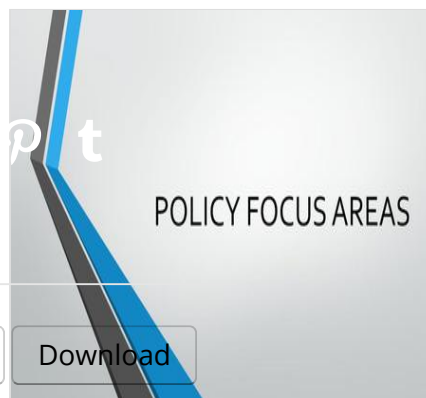
OLEH :
MAHRUZAR, SH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN, DELI SERDANG



Upload presentasi

Kami berharap bahwa Anda menikmati presentasi ini. Untuk men-download, silahkan rekomendasi presentasi ini kepada teman-teman Anda dalam jaringan sosial. Tombol yang harus diklik terletak di bawah posting ini. Terima kasih.



© 2019 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.

Tanggapan
Pengaturan dan alat privasi
Tanggapan

Tentang proyek
SlidePlayer
Syarat penggunaan

Penelusuran...

Penelusuran